

# BAB I

## PENDAHULUAN

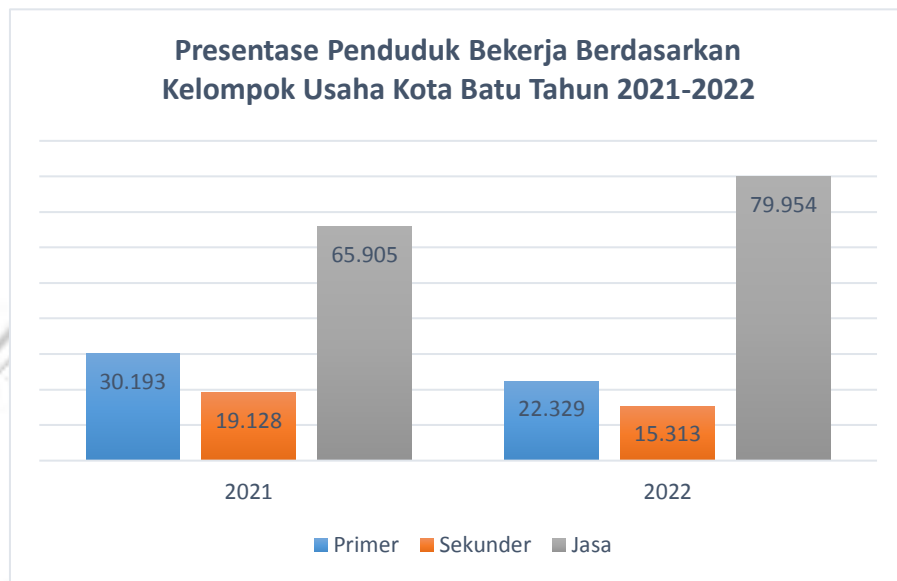
### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat tidak menentu hal ini ditandani dengan tingginya inflansi dimana semua harga komoditas pasokan negara yang melambung tinggi karena adanya pembatasan pasokan. Fakta bahwa Indonesia menjadi negara berkembang dapat ditunjukkan dengan kemajuan diberbagai bidang salah satunya pada sektor ekonomi dan pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya wilayah yang menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan penduduk yang bergantung pada kawasan yang berkomoditas pada pertanian. Kota Batu merupakan daerah agraris yang unggul pada sektor pertanian dimana kebanyakan dari masyarakatnya menjadikan pertanian sebagai ladang mata pencahariannya. Selain itu pertanian merupakan sebuah aktivitas perekonomian yang tujuannya untuk menambah pendapatan dengan melakukan peningkatan produksi nabati dan hewani. Karena pertanian sebagai penggerak pembangunan (*engine of growth*) yang dapat dilihat dari penyediaan bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta bahan beli dari produk yang dihasilkan (Anam & Soedarto, 2021).

Kota Batu merupakan daerah yang berkomoditas pada dataran tinggi dan perbukitan dimana sekitar 55,61% berada pada kawasan perhutanan sedangkan area pertanian sebesar 24% selebihnya diduduki oleh area pemukiman, pemerintahan, industri, pariwisata dan masih banyak lagi. Namun saat perekonomian di Kota Batu saat ini masih didukung oleh sektor pertanian. Dengan adanya kondisi lahan pertanian yang kurang sehingga menjadi permasalahan terhadap perkembangan perekonomian di Kota Batu hal ini diukur dari pertumbuhan ekonomi yang sempat mengguncang dimana mengalami penurunan sampai pada angka minus 6,46% pada tahun 2020. Namun diakhir tahun 2021 mengalami pemulihan perekonomian yang ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,04% dan semakin naik kembali pada tahun 2022 sekitar 6,18%. Namun dengan kondisi perekonomian yang cukup stabil Kota Batu masih mengalami permasalahan

kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi dengan total Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 78,99% sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,52 % sekitar tahun 2023 (Ir. Yuniarni Erry Wahyuti, 2022).

Grafik 1 Presentase Penduduk Bekerja



Sumber 1 Indikator Kesejahteraan : BPS 2022

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik Kota Batu terdapat penduduk yang bekerja pada sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan pertambangan) sekitar 30,193 orang pada tahun 2021 dan menurun menjadi 22,329 orang pada tahun 2022. Sedangkan yang berkerja pada sektor sekunder (industri pengelolaan, listrik, gas, air dan konturksi) sebesar 19,128 pada tahun 2021 dan semakin menurun menjadi 15,513 pada tahun 2022. Dan sektor jasa (hotel, pedagang, rumah makan, angkutan, komunikasi dll) sekitar 65,905 orang pada tahun 2021 dan semakin banyak peminat pada tahun 2022 sekitar 79,954 orang. Jika dilihat kurangnya kecenderungan masyarakat terutama kaum muda di Kota Batu dalam pertanian menjadi salah satu tantangan bagi para petani untuk mengelolah pertanian yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Kondisi masyarakat miskin di Kota Batu dari tahun ketahun cenderung menurun hal ini dikarena pemerintah Kota Batu telah berhasil menjalankan program pengentasan kemiskinan. Selain itu peningkatan presentase penduduk miskin tidak hanya terdapat di kota batu melainkan hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia. saat ini perbandingan kemiskinan pada wilayah Jawa Timur Kota presentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 11,09 % dan 11,40 %. Meski begitu Kota Batu masuk dalam kategori kemiskinan yang terendah di Jawa Timur.

Table 1 Presentase Kemiskinan Kota Batu

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	8,12	3,89
2021	8,63	4,09
2022	8,05	3,79
2023	7,10	3,31
2024	6,59	3,06

Sumber 2 Indikator Kesejahteraan : BPS Kota Batu 2022

Thomas Robert Malthus (1766-1834) menjelaskan dalam penelitian (Afriansyah & Suriani, 2021) mengenai “*The law of diminishing return*” apabila penduduk dibiarkan saja maka jumlah penduduk menjadi meningkat dengan kecepatan deret ukur dan menghabiskan ruang di muka Bumi. Hal tersebut menunjukkan apabila populasi penduduk meningkat dan tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maka menyebabkan permasalahan pangan bagi manusia. Dan berdampak terhadap permasalahan sosial seperti kelaparan, kemiskinan dan peningkatan angka kriminalitas. Selain itu apabila jumlah penduduk semakin meningkat dan sumber daya alam terbatas maka akan dapat menimbulkan permasalahan seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan bahkan permasalahan mengenai alih fungsi lahan (Ginting & Rasbin, 2023).

Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dan program yang berhubungan dengan pertanian dan ketahanan pangan. Dengan membuat sebuah program kegiatan berupa pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian pangan dan kedulatan pangan. Program ini dibuat untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dalam suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Marhaeti et al., 2022). Kegiatan program mandiri pangan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Batu salah satunya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program kemandirian pangan berkembang menjadi aktivitas yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Kota Batu dimana pelaksanaannya berupa aktivitas dan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok untuk mengatasi permasalahan rawan pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pertanian juga memiliki dampak yang cukup besar dalam ketersediaan prekonomian karena dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Oleh karenanya pertanian ini memiliki peran sangat penting sebagai tambahan pemasukan dan dapat dijadikan sebagai ladang pekerjaan yang memberikan kontribusi dalam pendapatan nasional dari ekspor yang berasal dari sektor pertanian serta memberikan peluang bagi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan dan ladangan pencahariaan untuk mencukupi sandang dan pangan bagi masyarakat (Andi Baso Siswadharma, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka membangun dan menjaga ketahanan pangan telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 yang membahas tentang ketahanan, keamanan, kemandirian dan distribusi pangan, Peraturan Wali Kota Batu No. 16 Tahun 2017 yang diturunkan dalam perubahan pada peraturan Wali Kota Batu No. 14 Tahun 2021 tentang perencanaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

Program kemandirian pangan selanjutnya di kembangkan dalam UU No. 14 tahun 2009 yang berbunyi “Kemandirian pangan merupakan kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan katahanan pangan

yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup pada tingkat rumah tangga berdasarkan sumber-sumber pangan yang beragam”. Selain itu dalam Peraturan Wali Kota Batu No. 16 Tahun 2017 yang diturunkan dalam perubahan pada peraturan Wali Kota Batu No. 14 Tahun 2021 tentang perencanaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Dimana menetapkan dua tujuan utama kinerja pada lingkup pemerintah Kota Batu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan salah satunya yaitu 1) meningkatkan kemandirian pangan daerah dengan meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah, 2) meningkatkan efektivitas perekonomian pada sektor pertanian yang berkelanjutan pada produksi pangan, perkebunan dan hortikultural.

Program kemandirian pangan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang dimulai dari pedesaan yang dapat dilihat dari keadaan sarana prasarana ditinjau dari ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan rumah tangga dan potensi desa yang sudah tersedia. Dengan demikian untuk mencukupi ketersediaan pangan ini nantinya perlunya sebuah inovasi yang lebih bagi pemerintah untuk menerapkan kemandirian pangan pada daerahnya. Karena salah satu langkah strategis untuk memelihara ketahanan pangan nasional adalah dengan upaya memelihara melalui perwujudan kemandirian pangan (R.Dudy Heryadi, 2022). Kemandirian pangan yang dilaksanakan di Kota Batu ini menjadi peluang bagi para kelompok wanita tani (KWT) atau Golongan Kelompok Tani Gapoktan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi tambahan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan diberikan pedoman, fasilitas dan pendampingan sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Dalam Pelaksanaannya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu membuat sebuah program dimana sebuah aktivitas untuk membudidayakan tanaman sesuai dengan kebutuhan pangan di perkarangan rumah mereka atau lahan kosong lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dimana budidaya jamur tiram yang menjadi pilihan bagi instansi untuk menjadi pengembangan usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaannya Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dan Badan Penyuluh Pertanian untuk mengawasi dan membantu kebutuhan masyarakat untuk menunjang keberhasilan pertanian. Program ini juga akan memberikan peluang bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk menghasilkan pendapatan (Qodrun Nada, 2020).

Kegiatan kemandirian pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu difokuskan kepada kelompok wanita tani (KWT) dan Gapoktan yang terletak di beberapa desa yang tersebar di Kota Batu. Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gapoktan ini akan mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 19.000.000. Nantinya bantuan ini dapat mereka gunakan untuk sebagai modal pertanian, pembelian alat dan bahan kegiatan kemandirian pangan. Dana hibah ini juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan untuk pembangunan kumbung jamur sebagai tempat produksi yang akan mereka jalankan. Kegiatan ini merupakan pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat yang kurang memahami mengenai akses teknologi, sumber daya, modal yang terbatas dan infrastruktur yang terbatas.

Fokus program kemandirian pangan yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertani berbagai jenis tanaman pangan berupa jamur tiram sebagai wujud pengelolaan sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pemanfaatan lahan ini oleh Pemerintah di desain dengan dibuatnya sebuah kumbung jamur yang didapatkan salah satunya dari bantuan hibah tersebut. Dengan adanya kemandirian budidaya dan pengelolaan jamur tiram pemerintah berharap dapat menambah peluang pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini dirancang dengan prosedur pelaksanaan yang dilakukan secara berkelompok yaitu melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) atau Gapoktan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan program selain itu beberapa kegiatan pertanian yang lainnya yang disubsidi oleh pemerintah kebanyakan berada dalam kelompok tani.

Dalam pelaksanaan programnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggandeng 5 desa (Desa Beji, Oro-oro ombo, Pendem, Sumberejo dan

Pesanggrahan) yang tersebar di Kota Batu yang sudah melaksanakan masyarakat mandiri pangan. Pada pelaksanaannya Dinas Pertanian dan ketahanan pangan yang difokuskan pada pelaksanaan aktivitas pemberdayaan masyarakat dengan menjalankan empat tahap yakni persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Kegiatan ini mengarah kepada kelompok tani yang masih rendah dalam hal sumber daya modal yang terbatas, akses teknologi yang masih rendah serta infrastruktur yang masih terbatas. Melalui pengelolaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dalam memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Tujuan kemandirian pangan ini untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kota Batu dan meningkatkan pemahaman bagi para kelompok tani dengan pemberdayaan dan penyediaan sarana dan prasana bagi petani.

Dari latar belakang di atas maka penulis akan meneliti dan menganalisis lebih mendalam mengenai “Implementasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan” yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai, “Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Untuk mengetahui bagaiman kondisi perekonomian masyarakat terhadap pelaksanaan program kemandirian pangan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kontribusi penting pada pengetahuan mengenai Implementasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. *Kedua*, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan kemandirian pangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, peneliti juga melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyusun kebijakan dan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat secara efektif. *Ketiga*, penelitian ini memberikan kontribusi dan memberikan manfaat bagi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikaji lebih mendalam, harapannya dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan kemandirian pangan budidaya jamur tiram di Kota Batu.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat relevan dalam berbagai aspek mengenai temuan penelitian tersebut. *Pertama*, bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh ilmuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat memberikan panduan praktis yang bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan melakukan analisis lebih mendalam dapat memberikan beberapa rekomendasi yang lebih spesifik yang dapat digunakan serta lebih berkelanjutan. *Kedua*, Dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dan kelompok tani Kota Batu dalam mengimplementasikan program kemandirian pangan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara mengembangkan pertanian dalam memanfaatkan lahan yang ada disekitaran pemukiman masyarakat. Sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat Kota Batu dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi serta meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Sedangkan bagi kelompok tani nantinya dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang

pertanian dan menambahkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat dan kelompok tani. *Ketiga*, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai implementasi program dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **1.5 Definisi Konseptual**

Beberapa pemeparan berupa teori atau definisi yang mendukung penjelasan lebih rinci dari propeosal sebagai berikut :

### **1.5.1 Implementasi**

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, perintah atau sebuah keputusan yang sangat penting. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan cara struktur atau mengatur proses implementasinya (Fauziyah & Arif, 2021). Selain itu implementasi juga dikenal dengan kumpulan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan dan tindakan untuk mencapainya memerlukan jaringan pelaksanan birokrasi yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan model implementasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Rangkaian implementasi kebijakan ini akan dapat mudah untuk dijelaskan dengan membuat sebuah program ke dalam sebuah proyek atau sebuah kegiatan.

Teori ini dikemukakan oleh Van Meter dan Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan dan swasta baik secara individu ataupun mereka secara berkelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang sedang berlangsung. Pada penelitian (Forwanti & Setiawan, 2022) menjelaskan terdapat enam variable yang digunakan Van Meter dan Van Horn dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut diantaranya : 1. Ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan publik dapat pada tahap berhasil dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis pada level pelaksanaan kebijakan bukan hal yang ideal sehingga mudah dalam merealisasikan, 2. Sumber Daya, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang

tersedia baik sumber daya manusia (SDM) dan (Finansial dan waktu). 3. Karakteristik Agen Pelaksana implementasi kebijakan yang merubah perilaku manusia secara radikal maka agen pelaksanakan harus memiliki karakteristik keras dan ketat pada aturan dan sanksi hukum. 4. Disposisi, sikap dari pelaksana dimana kebijakan yang dilaksanakan secara *top-down* yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan yang diselesaikan. 5. Komunikasi anatar organisasi dan aktivitas pelaksana, menekankan pada koordinasi komunikasi mekanisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, hal ini berkaitan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Sehingga model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn adalah gambaran kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model implementasi kebijakan ini merupakan model *top-down* yang memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanitis atau linier dan menekankan pada kepatuhan dan control efektif pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya ekonomi ini untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

### **1.5.2 Sumber Daya Ekonomi**

Ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin dengan jumlah sumber-sumber yang terbatas, sedangkan sumber daya ekonomi mengandung dua pengertian yaitu : (1) sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, (2) SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Dengan demikian ilmu ekonomi berusaha menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin dengan jumlah sumber-sumber yang terbatas.

George R. Terry mendefinisikan sumber daya ekonomi atau *human resources* yang mengandung makna bahwa sumber daya manusia (SDM)

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi (Syahputra & Aslami, 2023) Dan sumber daya alam (SDA) yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya ekonomi ini dapat memberikan manfaat serta keuntungan bagi manusia serta berfungsi sebagai modal dasar pembangunan ekonomi. Sumber daya ekonomi sendiri merupakan bentuk dari sumber daya konsumen karena sumber daya tersebut digunakan oleh manusia (sebagai konsumen) untuk berbagai kepentingan ekonomi.

Dalam buku Ekonomi Makro karya Joko Untoro pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat memiliki nilai tambah dan kemakmuran masyarakat (Fitriani et al., 2023). Sehingga dapat meningkatkan jangka panjang, sehingga pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

### **1.5.3 Kemandirian Pangan**

Konsep kemandirian pangan (*Self Reliance*) merupakan istilah yang bersinonim dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara signifikan. Kemandirian pangan adalah “Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam mulai dari dalam negeri sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai kepada perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial dan ekonomi serta kearifan lokal” (Deliar Noer, 1990). Definisi menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (*FAO*) kemandirian yaitu kemampuan dalam mencegah permasalahan dan krisis pangan dan mengantisipasi, menyangga atau menampung dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Dalam hal ini juga termasuk melindungi, memulihkan dan meningkatkan sistem mata pencaharian untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan, kecukupan nutrisi dan keamanan pangan.

Kemandirian pangan merupakan sebuah usaha setiap masyarakat khususnya para petani untuk berusaha mendapatkan pangan secara mandiri. Dimana mereka adalah produsen pangan yang utama negara atau wilayah sehingga produksi pangan mereka tidak bergantung pada bantuan dari pihak luar untuk memperoleh makanan. Dengan adanya pencapaian kemandirian akan memungkinkan petani untuk memiliki kemandirian sendiri, dan membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan para petani. Menurut Sajogyo (1996) dalam penelitian (Marshya et al., 2023) keberhasilan produksi produk pertanian (*food availability*) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu berasal dari: kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kepemilikan lahan, Kesuburan tanah, cuaca, serta adanya sarana infrastruktur. Selain itu kemandirian pangan ini sangat membutuhkan keberlanjutan ketahanan pangan sehingga kemandirian pangan ini perlu membutuhkan produksi yang setara dengan keragaman pertumbuhan penduduk dan konsumsi pangan per kapita. Selain itu kemandirian pangan ini juga cukup untuk untuk mengurangi atau menurunkan dan mengurangi alih fungsi lahan, kerusakan lahan sehingga dapat menunjang ketahanan pangan yang sangat meningkat.

## **1.6 Definisi Operasional**

Menurut Masri Singarimbun dalam (Kusumastuti, 2020) definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan dengan pelaksanaan untuk mengukur suatu variable yang dirumuskan dalam bentuk beberapa penjelasan yang memudahkan penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya :

### **1.6.1 Implementasi**

Van Metter dan Van Horn menjelaskan mengenai implementasi yang terdapat enam variabel yang saling berkaitan variabel-variabel tersebut meliputi : a) standar dan tujuan, b) sumber daya, c) komunikasi antar organisasi pelaksana, d) karakteristik lembaga pelaksana kebijakan, e) lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan terakhir implementor. Dalam

teori Van Meter dan Van Horn dijelaskan implementasi merupakan sebuah kerangka untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang penting dan sering muncul. Sedangkan menurut pandangan Edward Implementasi merupakan tahap antara pembentukan kebijakan dan penyebab permasalahan masyarakat akan dapat teratasi apabila dapat diselesaikan dengan menggunakan empat variable yaitu: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi dan d) sturktur birokrasi.

Sebenarnya implementasi berfokus kepada aktivitas, adanya tindakan atau mekanisme pada suatu sistem. Mekanisme ini mengandung arti bahwa implementasi lebih dari sekedar aktivitas saja melainkan sebuah kegiatan yang sudah direncana dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan acuan dan aturan tertentu dalam mencapai sebuah tujuan kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung untuk mencapai sebuah tujuan. Ada 6 variabel yang digunakan Van Meter dan Van Horn dalam menjelaskan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

**a. Tujuan Kebijakan**

Dalam mengukur keberhasilan kebijakan dapat diukur dengan menilai dari tingkat keberhasilan dan tujuan dari yang ada di level kebijakan. Apabila ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan yang ada untuk diterapkan pada tingkat masyarakat terlalu ideal, maka agak sulit untuk merealisasikan sebuah kebijakan sampai kepada titik keberhasilan. Hal ini dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan sudah realistis pada level pelaksanaan kebijakan dan bukan hal yang ideal sehingga menyulitkan dalam merealisasikan implementasi sampai berhasil.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan mencapai sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sumber daya lain seperti (finansial dan waktu). Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dalam hal ini manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dari tahapan-tahapan tertentu sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang sudah disyaratkan.

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Organisasi formal dan organisasi informal merupakan sebuah agen pelaksanaan karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa dari agen pelaksanaan tersebut. Apabila sebuah implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, sehingga agen pelaksana proyek harus memiliki sifat yang sesuai dengan aturan. Namun apabila kebijakan tersebut terlalu merubah kepada tingkah laku dasar manusia maka agen pelaksanaan yang diturunkan dari aturan yang sudah ditetapkan.

**d. Sikap Pelaksana atau Disposisi**

Sikap dari para pelaksana (Disposition) para pelaksana, hal ini kebijakan yang dilaksanakan bukan dari hasil formulasi masyarakat yang memahami mengenai permasalahan yang sedang terjadi melainkan kebijakan yang dilaksanakan *top-down* yang memungkinkan para pelaksana untuk mengambil keputusan tanpa mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan.

**e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana**

Pada tahapan ini pelaksanaan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan. Apabila komunikasi dan koordinasi ini semakin baik maka permasalahan-permasalahan pada saat pelaksanaan akan sedikit terjadi namun apabila koordinasi dan komunikasi tersebut tidak baik maka akan banyak permasalahan pada saat proses pelaksanaan.

**f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Tiga elemen ini berkaitan dengan seberapa jauh lingkungan eksternal dalam mendorong sebuah keberhasilan implementasi. Hal ini Van Meter dan Van Horn menawarkan dengan adanya lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif yang dapat menyebabkan kegagalan pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan

implementasi tersebut diharapkan untuk memperhatikan kekondusifan pada lingkungan eksternal.

## **1.7 Metode Penelitian**

Menurut Subagyo yang dikutip dalam (Bahri, samsul 2015) metode yang berfungsi untuk memecahkan berbagai permasalahan disebut dengan metode penelitian. selanjutnya metode penelitian ini pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu kata kunci yang perlu diperhatikan pada penelitian pada metode ilmiah, data, maksud dan kegunaan. Sehingga dari adanya metode penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai suatu objek dari penelitian dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan berbagai penjelasan sebagai berikut :

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis sumber data langsung saat berada di lapangan, berupa Implementasi Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Dalam Pengelolaan Kemandirian Pangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Penelitian kualitatif ini menjelaskan secara realitas dengan menggunakan penjelasan secara rinci, mendalam dan mudah untuk di fahami. Nantinya metode kualitatif ini diharapkan untuk mendapatkan informasi secara mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komperhensif. Dengan menggunakan teknik ini penelitian diharapkan dapat mengambil sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, unit sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

### **1.7.2 Sumber data**

#### **A. Data Primer**

Penelitian ini berasal dari hasil wawancara secara langsung kepada pengumpul data. Menurut (Sandu Siyoto & Sodik, 2020) data primer

merupakan data yang di dapatkan langsung saat di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan dari hasil catatan hasil wawancara dan observasi secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer sederhananya yang dilakukan langsung kepada Bidang Ketahanan Pangan di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan para kelompok petani untuk mengumpulkan data dan penelitian ini diharapkan dapat mengamati gambaran secara lengkap mengenai situasi yang terjadi di lapangan.

## **B. Data Sekunder**

Menurut (Sandu Siyoto & Sodik, 2020) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang sudah ada. Salah satunya dari catatan atau hasil literatur, buku dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen yang sudah disediakan oleh Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Selain itu data skunder ini ada yang termuat dalam bentuk dokumen mengenai program kemandirian pangan di Kota Batu serta berupa dokumen foto atau video.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan berikut adalah rincian penggunaan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi :

#### **a. Observasi**

Menurut Nawawi dan Martini Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang ditemuakn dalam situasi objek penelitian, Sedangkan penjelasan observasi menurut Matthews and Ross merupakan :

*“Observation is the collection of data through the use of human senses. In some natural conditions, observation is the act of wathcing social phenomenon in the real world and recording events as they happen”.*

Dalam pemikirannya Mattews menjelaskan observasi merupakan metode pengumpulan data melalui panca indra manusia yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan observasi. Hal yang dapat dilakukan pada pelaksanaan observasi berupa proses pengamatan, pendengaran atau pengingatan. Dengan kata lain observasi merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan pancaindra yang di kumpulkan untuk di analisis lebih mendalam. Pada saat ini peneliti langsung turun untuk mengamati permasalahan secara langsung terhadap pelaksanaan program kemandirian pangan yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok tani di Kota Batu sekiranya dapat berjalan sesuai tahapan prosedur yang sudah disediakan.

**b. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau subjek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Proses wawancara dapat dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi wawancara merupakan sebuah metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu seseorang yang menjadi informan atau responden. Proses wawancara menurut Esterberq dalam sugiyono (2023) merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk tanya jawab terkait informasi mengenai tema yang diinginkan. Dalam pandangannya Esterbaerq menggali dan memperoleh sebuah informasi dengan melakukan beberapa cara yaitu :

- a. Wawancara Terstruktur, merupakan proses wawancara yang sudah disiapkan dan sudah tersusun mengenai pertanyaan yang akan disampaikan kepada subjek atau narasumber yang bersangkutan.
- b. Wawancara Semiterstruktur, merupakan tahapan wawancara yang dilakukan dengan berdasarkan panduan dari pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan campuran dari beberapa pertanyaan yang lebih luas atau secara langsung pada saat berada dilapangan bersama narasumber.

- c. Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun namun hanya diambil beberapa point dari garis besar permasalahan atau point penting yang ini peneliti ketahui dari narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara secara semiterstruktur langsung kepada narasumber atau subjek yang menjalankan program ini dan bagian dari bidang ketahanan pangan sebagai pelaksanaan program.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Mawawi dan Martini (2023) merupakan teknik observasi dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis berdasarkan unsur-unsur yang nampak pada gejala-gejala dalam objek penelitian. Pengamatan ini berupa hal yang berkaitan pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada saat berada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang di dapatkan peneliti dari UU No. 18 Tahun 2012 yang membahas tentang ketahanan, keamanan, kemandirian dan distribusi pangan, Peraturan Wali Kota Batu No. 16 Tahun 2017 yang diturunkan dalam perubahan pada peraturan Wali Kota Batu No. 14 Tahun 2021 tentang perencanaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Dokumen Renja, Renstra, LKJIP, APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Selain itu peneliti juga mengambil gambar pada saat melaksanakan wawancara terhadap subjek yang diteliti dan data pendukung yang sesuai dengan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

**d. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai informan yang berarti mereka dalam penelitiannya memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian (Sumiati, 2021). Subjek penelitian sangat strategis untuk meneliti karena data yang diperoleh dari permasalahan yang sedang diamati. Adapun subjek dalam penelitian ini melibatkan beberapa aktor untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian yaitu :

1. Heru Yulianto, SP. MM. : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu
2. Lestari Aji, S.Pi, M.Agr : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
3. Niken , S.TP, MT, MPP : Koordinator Program Pengelolaan SDM
4. Nanik Analosin, S.TP : Koordinator Pengelolaan Cadangan Pangan
5. Ibu Rusimini : Ketua Kelompok Wanita Tani Asri
6. Bapak Muarifin : Badan Penyuluh Lapang
7. Ibu Rini : Ketua Kelompok Wanita Tani Sri Lestari

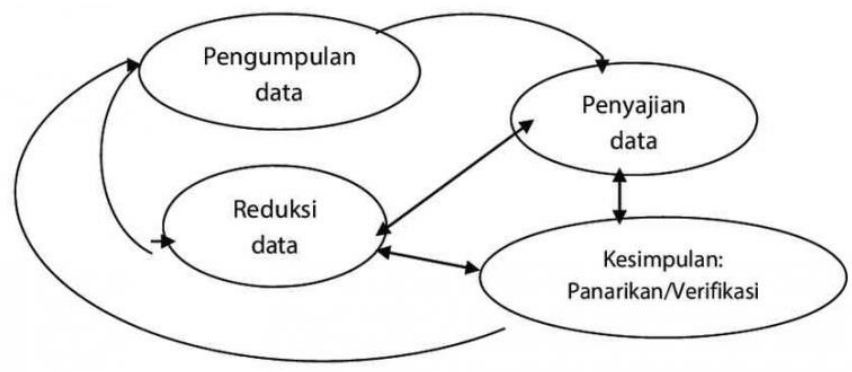
**e. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 3, Pesanggrahan, Batu, Kec. Batu, Jawa Timur 65313.

**f. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif. Analisis merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar untuk menentukan tema sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data. Dalam penelitian kali ini peneliti diharapkan dapat menjelaskan dengan menggunakan pola analisis yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang dituangkan di dalam grafik sebagai berikut :

Bagan 1 Analisis Model Interaktif



Sumber 3 Miles, Hubberman & Saldana 2014

**a. Pengumpulan Data**

Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.

**b. Reduksi data**

Merupakan sebuah upaya untuk menyimpulkan data kemudian disesuaikan dalam satu konsep, kategori dan tema tertentu yang kemudian di olah berbentuk laporan atau artikel untuk memudahkan peneliti dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dan kerangka teori penelitian sampai metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti

**c. Penyajian data**

Proses pengumpulan informasi ini disusun untuk menarik sebuah kesimpulan dan untuk mengambil tindakan berupa penyajian data. Metode penyampaian data ini berbentuk tek naratif berupa catatan matrik, grafik dan bagan yang digabungkan dari informasi yang diperoleh kemudian difahami sehingga mudah melihat apa yang sedang terjadi untuk memastikan apakah kesimpulan sudah tepat atau perlu untuk di analisis kembali.

**d. Penarikan Kesimpulan**

Pada saat di lapangan peneliti membuat kesimpulan untuk menjadi makna objek dari awal pengumpulan data untuk memberikan penjelasan. Meskipun hal ini secara terbuka oleh peneliti sudah dijelaskan kurang jelas. Kemudian peneliti memverifikasikan menjadi lebih jelas dan lebih kuat selama penelitian berlangsung agar ditinjau kembali untuk menjadi tolak ukur yang lebih subjektif.